

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- AP. Parlindungan. 1998. *Komentar Undang-undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju.
- Aslan Noor. 2006. *Konsepsi Hak Milik atas Tanah bagi Bangsa Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Bahder Johan Nasution dkk. 2020. *Pedoman Penulisan Tesis Prodi MH Fakultas Hukum UNJA*. Jambi: Universitas Jambi Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum.
- Boedi Harsono. 2005. *Sengketa-Sengketa Tanah serta Penanggulangannya*. Jakarta: Djambatan.
- , 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. edisi revisi, Jakarta: Djambatan.
- 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Jilid 1 Djambatan.
- , 2006. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- Budi Agus Riswandi. 2005. *Aspek Hukum Internet Banking*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eddy Ruchiyat. 1999. *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*. Bandung: Alumni.

- Elita Rahmi. 2011. *Hukum Pertanahan dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: UNPAD Press.
- Elza Syarief. 2012. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Fence M. Wantu. 2011. *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ida Nurlinda. 2009. *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- K. Wantjik Saleh. 2004. *Hak Anda Atas Tanah*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- M. Mukhsin Jamil. 2010. *Mengelola Konflik Membangun Damai*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Maria S.W. Sumardjono. 1982. *Tinjauan Kasus Beberapa Masalah Hukum Agraria*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Muhammad Fauzan. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah. Edisi revisi*. Purwokerto: STAIN Press.
- Nia Kurniati. 2016. *Sengketa Pertanahan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Refika Aditama.
- Notonegoro. 2001. *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Philippus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- R. Wiyono. 2010. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachmadi Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusmadi Murad. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah*. Jakarta: Alumni.

- Sadjijono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Salim HS dan Erlies SN. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan ke -1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarjita. 2005. *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Soetomo. 1981. *Pedoman Jual Beli Tanah Peralihan Hak dan Sertipikat*. Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya.
- Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Suwoto Mulyosudarmo. 1997. *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suyud Margono. 2000. *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. Jurnal/Disertasi/Artikel

- A. Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi*, (Jakarta: Universitas Indonesia).
- Ayu Larasati dan Raffles, “Peralihan Hak atas tanah Dengan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Pertanahan Indonesia”, *Zaaken Journal of Civil and Bussiness Law*, Volume 1 Nomor 1 Februari 2020.
- Indra Ardiansyah, *Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak atas tanah Dalam Kaitannya Dengan Pengaturan Tanah Terlantar* (Studi Pada Wilayah Cisarua Kabupaten Bogor), Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas diponegoro Semarang 2010.
- Meita Djohan Oe, “Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah”, *Jurnal Pranata Hukum* Program Studi Magister

Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung
Volume 10 Nomor 1 Januari 2015.

Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Yuridika* Nomor 5 dan 6
Tahun XII, Sep-Des 1997.

----- *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegheid)*, (Bandung,
dalam Pro Justitia, Majalah Hukum Fakultas Hukum Universitas
Katholik Parahyangan, No.1, Tahun XVI).

Rosmidah, Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Dan Hambatan Implementasinya, *Inovatif. Jurnal Ilmu Hukum Vol 2,*
No 4 (2010), Inovatif

Yusril Ihza Mahendra dalam Akram, *Kajian Kewenangan Pembatalan
Sertipikat Tanpa Putusan Pengadilan*, By: Laras Post on November 10,
2016.

C. Kamus

Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta.

Tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat*.
Jakarta: Depdiknas.

WJS. Poerwadarminta. 2000. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cetakan
Kedelapan. Jakarta: Balai Pustaka.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Undang-
undang Pokok Agraria*. UU Nomor 5 Tahun 1960. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043.

----- *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa*. UU Nomor 30 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3872.

----- Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah. PP Nomor 24
Tahun 1997. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696.

----- *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Sengketa*

pertanahan. PERKABAN Nomor 3 Tahun 2011.

_____ *Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional tentang Penyelesaian Sengketa pertanahan.
PERMEN AGRARIA Nomor 11 Tahun 2016.*

_____ *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang uraian
tugas subbagian dan seksi pada kantor wilayah badan pertanahan
nasional dan uraian tugas urusan dan subseksi pada kantor pertanahan.
PERKABAN Nomor 4 Tahun 2006.*

----- *Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja BPN-RI.*

A. Artikel Internet

Bachtiar, *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi*,
bachtiarproperty.com, tanggal akses 25 Juni 2021.

Diah Restuning Maharani, *Teori Kewenangan*, <http://restuningmaharani.com>,
diakses pada tanggal 10 September 2021.

Pramesti, Tri Jata Ayu. "Ulasan lengkap: Litigasi dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa di Luar Pengadilan". Hukum Online.com. Diakses tanggal 04
Juni 2021.